

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT RENGAT BARAT KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**



OLEH :

MELATI PERMATA SARI

175310219

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2021

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Fakultas
Ekonomi dan bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

MELATI PERMATA SARI

175310219

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp.
(0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Melati Permata Sari
NPM : 175310219
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan
Keuangan Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten
Indragiri Hulu

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Dr. H. Zulhelmy, SE, Msi, Ak., CA., ACPA

Mengetahui:

DEKAN

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

KETUA PRODI

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : Melati Permata Sari
NPM : 175310219
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT
RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULUR

Disetujui Oleh:

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Azwirman, Dr, M.Si, Ak., CA

()

2. Yolanda Pratami, S.E., M.Ak

()

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi S1

Pembimbing,



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



Dr. H. Zulhelmy, SE, Msi, Ak., CA.,
ACPA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834
PEKANBARU - 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : Melati Permata Sari
2. NPM : 175310219
3. Hari/Tanggal : 22 Desember 2021
4. Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Seminar dibuka oleh Dr.H.Zulhelmy,S.E.,M.Si,Ak,CA,ACPA dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan skripsi, selama lima belas menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Azwirman, Dr, M.Si, Ak., CA			
	1. Perbaiki Tujuan Penelitian	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 5	
	2. Perbaiki Hipotesis	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 18	
	3. Pengukuran indikator akuntabilitas	Sudah dipebaiki	Terlihat dihalaman 24	
	4. Pengukuran indikator transparansi	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 25	
	5. Indikator Pengukuran Kinerja tidak perlu	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 26	
	6. Akuntabilitas proses dari mana tahu	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 35	
	7. Pembahasan	Sudah	Terlihat	

	<p>Perbaiki Sesuai Indikator Akuntabilitas dan Transparansi</p> <p>8. Buat transparansi pengungkapan dalam pembahasan</p> <p>9. Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak perlu dimasukkan</p> <p>10. Pengukuran kinerja Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kantor Camat tidak perlu dan pindahkan ekonomis,efisien,dan efektivitas dalam indikator akuntabilitas finansial</p>	<p>diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p>	<p>dihalaman 34-40</p> <p>Terlihat dihalaman 40</p> <p>Terlihat dihalaman 40</p> <p>Terlihat dihalaman 36-39</p>	
2	<p>Yolanda Pratami, S.E., M.Ak</p> <p>1. Perbaiki Abstrak</p> <p>2. Perbaiki Abstrak B.Ingggris di miringkan</p> <p>3. Perbaiki Daftar</p>	<p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah</p>	<p>Terlihat dihalaman i</p> <p>Terlihat dihalaman ii</p>	

	Isi	diperbaiki	
4.	Samakan ukuran huruf pada tabel penelitian terdahulu 12	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman vi
5.	Perbaiki Kalimat Double	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 19
6.	Pembahasan diperbaiki sesuai indikator	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 34 Terlihat dihalaman 34-40

Mengetahui,

Disetujui,



Hj. Siska, SE., M.Si,Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dr.H.zulhelmy,S.E.,M.Si.Ak.ACPA
Pembimbing



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834

PEKANBARU - 28284

NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL

1. Nama Mahasiswa : Melati Permata Sari
2. NPM : 175310219
3. Hari/Tanggal : 12 Agustus 2021
4. Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

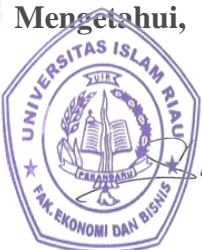
Seminar dibuka oleh Dr.H.Zulhelmy,S.E.,M.Si,Ak,CA,ACPA dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan proposal, selama lima belas menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA 1. Jelaskan permasalahan pertahun untuk akuntabilitas dan transparansi. 2. Perbaiki Indikator untuk akuntabilitas dan transparansi. 3. Wawancara kepada masyarakat.	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 5 Terlihat dihalaman 20 Bab III Terlihat dalam lampiran foto dokumentasi.	
2.	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak. 1. Buat dalam bentuk pertanggungja wban 2. Paragraf 1 kaliman 3 tidak	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 1 Bab 1 Terlihat dihalaman	

	perlu dibuat		1 Bab 1
	3. Masukan kutipan	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 1 bab 1
	4. Sebutkan hasil penelitian atau kah apa	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 2
	5. Perbaiki Bahasa tidak boleh menggunakan nampaknya	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 4
	6. Anggaran dan Realisasi Pertahun	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 5
	7. Telaah Pustaka tidak usah	Sudah diperbaiki	Terlihat pada halaman 8
	8. Tambahkan teori Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Sudah diperbaiki	Terlihat pada halaman 11-12
	9. Perbaiki Indikator Akuntabilitas dan Transparansi	Sudah diperbaiki	Terlihat pada halaman 18-19

Mengetahui,

Disetujui,



Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dr.H.Zulhelmy,S.E.,M.Si,Ak,CA,ACPA
Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681 Fax (0761) 674834
PEKANBARU -2828

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MELATI PERMATA SARI
NPM : 175310219
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT
RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
SPONSOR : Dr. H. Zulhelmy, S.E., M.Si, Ak, CA, ACPA

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tanggal	Catatan	Berita Acara	Paraf
	Sponsor		Sponsor
13/04/2021	X	1. Dalam latar belakang masalah belum dimasukan data program dan capaian serta realisasinya	
17/04/202		2. Pembahasan informasi dari tokoh setempat tentang keterbukaan untuk memperkuat alasan meneliti.	
30/06/2021		3. Tambahan bab 3 tentang operasional atau indikator.	
14/07/2021		4. ACC PROPOSAL	
01/12/2021	X	1. Tambahan pembahasan pada bab 4 dan bab 5	
02/12/2021		2. Tambahan pembahasan pada indikator akuntabilitas dan transparansi	
03/12/2021		3. ACC SKRIPSI	

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 1783/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 20 Desember 2021, Maka pada Hari Selasa 21 Desember 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022

1. Nama : Melati Permata Sari
2. NPM : 175310219
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Tanggal ujian : 21 Desember 2021
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau FEB UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : **Lulus (B) 66,9**
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr.H. Zulhelmy, SE., M. Si., Ak., CA., ACPA (.....)
2. Dr. Azwirman, SE., M. Acc., CPA (.....)
3. Yolanda Pratami, SE., M. Ak (.....)

Notulen

1. Efi Susanti, SE., M.Acc (.....)

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Mengetahui
Dekan,



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

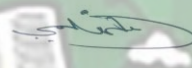
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Melati Permata Sari
NPM : 175310219
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
Hari/Tanggal : Selasa 21 Desember 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr.H. Zulhelmy, SE., M. Si., Ak., CA., ACPA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Azwirman, SE., M. Acc., CPA		
2	Yolanda Pratami, SE., M. Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 67,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 21 Desember 2021
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 1783 / Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral komprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

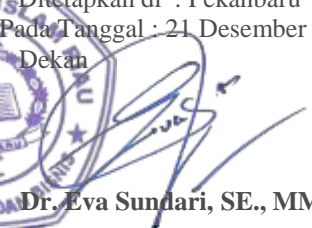
Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Melati Permata Sari
N P M : 175310219
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Asisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Efi Susanti, SE., M.Acc	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Desember 2021
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Melati Permata Sari
NPM : 175310219
Judul Proposal : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
Pembimbing : Dr. H. Zulhelmy, SE., M. Si., Ak., CA., ACPA
Hari/Tanggal Seminar : Kamis 12 Agustus 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M. Si., Ak., CA., ACPA	Ketua	1.
2.	Hj. Alfurkaniati, SE., M. Si., Ak., CA	Anggota	2.
3.	Lintang Nur Agya, SE., M. Acc., Ak	Anggota	3.

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis



Dina Hidayat, SE., M. Si., Ak., CA

Pekanbaru, 12 Agustus 2021
Sekretaris,



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM
RIAU**

Nomor: /Kpts/FE-UIR/2000

**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 0000-00-00 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

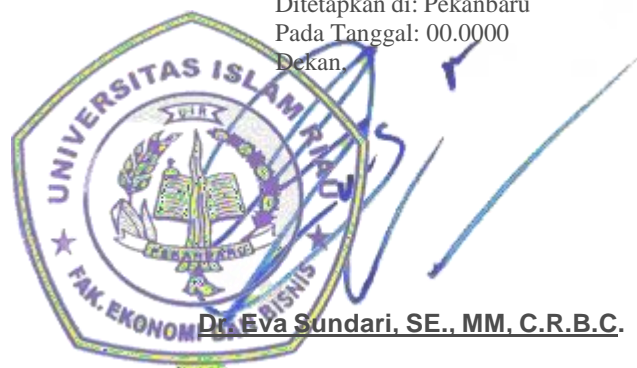
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M. Si., Ak., CA., ACPA	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- Nama : Melati Permata Sari
N P M : 175310219
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 00.0000
Dekan,


Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : MELATI PERMATA SARI
NPM : 175310219
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA KANTOR CAMAT RENGAT BARAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 %
yaitu 30 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk
dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai
prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Pekanbaru, 12 Januari 2022
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat ataupun pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 12 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

Melati Permata Sari

NPM: 175310219

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang terletak di Desa Pematang Reba. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam skripsi.

Hasil penelitian ini bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan dengan indikator akuntabilitas program belum menunjukkan adanya kepuasan pada masyarakat, indikator kebijakan telah sesuai, indikator akuntabilitas proses pertanggungjawaban secara administrasi kurang baik, indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum telah sesuai, sedangkan akuntabilitas finansial tingkat transparansi pengelolaan keuangan belum optimal dan belum efektif. Transparansi pengelolaan keuangan pada indikator informatif rincian anggaran APBD masyarakat kurang mengetahui pengelolaan keuangan dari dana transfer pemerintah terkait pembangunannya untuk dana desa. Indikator Keterbukaan penyampaian bentuk sistem informasi website yang masih kurang baik. Indikator Pengungkapan sudah cukup baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability and transparency of financial management at the District Office of West Rengat, Indragiri Hulu Regency. The location of this research was carried out at the Rengat Barat Sub-district Office, Indragiri Hulu Regency, Riau Province, which was located in Pematang Reba Village. The types and sources of data used are primary and secondary data. The method used is descriptive qualitative by comparing the existing practice and theory, then a conclusion is drawn to be presented in the thesis.

The results of this study are financial reporting accountability with program accountability indicators not showing satisfaction to the community, policy indicators are appropriate, administrative accountability process accountability indicators are not good, honesty and legal accountability indicators are appropriate, while the level of financial accountability is appropriate. transparency of financial management has not been optimal and has not been effective. Transparency of financial management in informative indicators of the details of the APBD budget, the community does not know about the financial management of government transfer funds related to its development for village funds. An indicator of openness of delivery in the form of a website information system that is still not good. The Disclosure Indicator is quite good.

Keywords: *Accountability, Transparency, Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP)*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan judul skripsi yaitu **Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu** ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan berbagai pihak. oleh karena itu, dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Alm. Aryunadi S.H dan Mami Ir. Dian Ridayani, serta kedua abang penulis yaitu Nico Anjasmara S.T dan Bang Denny Ardiansyah S.kom, serta kedua adik penulis yaitu Mawar Permata Sari dan Indah Ananda Putri yang selalu memberikan dukungan moral maupun materi serta doa dan semangat yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC Selaku Dekan Universitas Islam Riau Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Ibu Dr.Siska, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Bapak Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Bapak Muhammad Fahdi, SE., M.Ak selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sabar dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan, masukan dan motivasi kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu nama dan jabatannya yang telah mengajarkan serta memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
9. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah bersedia membantu dan melayani kelengkapan administrasi selama perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak H.Hendry, S.Sos., M.Si, ibu Rini dan para pegawai atau staff yang ada dilingkungan Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang selama ini telah banyak menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian.
11. Dicki Setiadi sahabat penulis di Rengat yang selalu menemani penulis melakukan penelitian mulai dari izin melakukan penelitian di Kantor Camat Rengat Barat, observasi, ambil data, wawancara dan hingga skripsi ini selesai.
12. Para sahabat penulis semasa SMA yang sudah mendukung, memberi semangat, motivasi, kepada penulis Anna Oktavia S.Ked, Dini Ananda Putri, Nurliana.
13. Para sahabat semasa SMP yang sudah seperti keluarga kedua, tetap masih akrab dan harmonis, memberikan semangat, motivasi, dukungan kepada penulis Aldina Islami, Wahyudi, Ryan Syuhada, Izul Karnain, Pretty Pitaloka.
14. Teman-teman seperjuangan di jurusan Akuntansi kelas G dan teman dari Ospek, Mutiara Sri Wulandari, Winia Aulia Rahman, Fadhla Luthfe Riola Aprilicia Dalvin, Gita Syah Bani, Nia Audina, Maulaya Idlovi, Sabrina Sakira dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu selama proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga

semua ilmu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis skripsi menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian. Mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Aamiin ya Robbal'Alamiin.



Pekanbaru, 22 Desember 2021

Melati Permata Sari
175310219

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1 Telaah Pustaka	10
2.1.1 Akuntabilitas	10
2.1.2 Transparansi	11
2.1.3 Akuntabilitas keuangan daerah	13
2.1.4 Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	13
2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	16
2.1.6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	17
2.1.7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010	17
2.1.8 Pengukuran Kinerja	18
2.1.9 Penelitian Terdahulu	21
2.2 Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Lokasi Penelitian	24
3.2 Jenis dan Sumber Data	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 Teknik Analisis Data	25
3.5 Indikator Akuntabilitas dan Transparansi	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	29
4.1.1 Gambaran Singkat Kecamatan Rengat Barat.....	29
4.1.2 Aspek Geografi	29
4.1.3 Visi dan Misi Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	32
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	32
4.1.5 Struktur Organisasi	34
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
4.2.1 Akuntabilitas	36
4.2.2 Transparansi	41
4.2.3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Simpulan.....	48
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1 Topografi dan Ketinggian dari Permukaan Laut menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengat Barat.....	27
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daeah Pemerintah Daeah Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2018-2019.....	37
Tabel 4.3 Capaian Kinerja Kecamatan Rengat Barat tahun 2018.....	38
Tabel 4.4 Capaian Kinerja Kecamatan Rengat Barat tahun 2019.....	40



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI34



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Keuangan Kantor Camat Rengat Barat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2018-2019
- Lampiran 2 : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2019
- Lampiran 3 : Kartu Investari Barang (KIB) Barang Milik Daerah Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Hasil Pemutakhiran Data Aset Daerah Tahun 2018 dan Tanpa Penyusutan Hasil Pemutakhiran Data Aset Daerah Tahun 2019
- Lampiran 4 : EVALUASI KINERJA KECAMATAN (EKK) Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2019
- Lampiran 5 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik (STOCK OFNAME) dan Berita Acara Persediaan
- Lampiran 6 : Buku Kas Keluar Kabupaten Indragiri Hulu
- Lampiran 7 : Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas pengguna akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Tuntutan dalam pengelolaan dilakukan pertanggungjawaban dan transparansi atas menyajikan, menyusun, melaporkan dan pemberian informasi kepada publik sesuai pemenuhan hak-hak publik. Kewajiban pemerintah dalam menyusun laporan keuangan diwujudkan sebagai akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara.

Kewajiban seluruh instansi ini baik di pemerinthan pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Saat ini terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan transparan dalam mengelola keuangan negara. Tuntutan akuntabilitas ini menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*).

Akuntabilitas dan transparansi memiliki keterkaitan satu sama lain. Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dan transparansi menunjuk pada kebebasan untuk

memperoleh informasi. Menurut dokumen United Natoin Development Program (UNDP) yang dikutip oleh Agus Dwiyanto (2008) mendefinisikan Akuntabilitas adalah standar dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemilik mandat atau rakyat. Sedangkan transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan.

Berkaitan dengan hasil penelitian dari Dafit Tamalah isu pentingnya tentang akuntabilitas (Haque, 1997) dalam (pamungkas, 12) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas ini senantiasa dikaitkan dalam meningkatnya tanggung jawab yang harus di miliki pemerintah daerah, yaitu dengan mendorong terciptanya tuntutan dalam memenuhi peraturan yang ada atas kinerja akuntabilitas tersebut. akuntabilitas dan Transparansi ini memiliki keterkaitan satu sama lain. akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan sedangkan Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan kepentingan manajemen, akuntabilitas, transparansi dan keseimbangan antar generasi.

Akuntabilitas kinerja adalah salah kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik ini diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik.

Proses inilah yang akan menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya.

Akuntansi memiliki hubungan yang sangat erat dengan beberapa prinsip good governance, karena akuntansi pada hakekatnya merupakan proses pencatatan transaksi keuangan secara sistematis yang mengarah pada pelaporan keuangan daerah. akuntabilitas, transparansi, dan Partisipasi ini akan meningkatkan jika didukung oleh sistem akuntansi dan laporan yang menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akuntabel. Sebaliknya, jika pelaporan informasi akuntansi kurang dan tidak akurat, maka akan menunjukkan kurangnya kinerja dalam partisipasi publik, akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemampuan untuk aksesibilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan pada stakeholder adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah.

Penerapan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan akrab. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh peraturan pemerintah yang mengikat seluruh pemerintah daerah khususnya kecamatan dan pemerintah pusat berupa undang-undang, oleh karena itu setiap kecamatan juga harus menyusun laporan keuangan.sebaik mungkin. Keterbukaan adalah data atau informasi untuk

publik yang dapat diakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi juga dapat menunjukkan ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat luas untuk mengetahui proses pelaksanaan, persiapan, dan hasil yang telah dicapai melalui suatu kebijakan publik. Transparansi juga dapat diwujudkan dalam bentuk keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diakses oleh publik. Hal ini dapat menciptakan akuntabilitas kepada masyarakat luas antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, efisien dan efektif bagi berkembangnya aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat.

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis: (1): sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik (2) berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*); dan (3) kejelasan peran dan tanggungjawab di antara lembaga merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya. Ketiga aspek ini saling berkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggungjawab masing-masing lembaga terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi.

Apa yang dilakukan dalam setiap tahapan oleh lembaga yang berperan dan bertanggungjawab itu harus menunjukkan akuntabilitasnya. Menurut Hasana dan Fauzi , akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan pemerintahan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Uraian di atas memberikan arahan kepada kita bahwa transparansi dan akuntabilitas pada dasarnya adalah: pertama, dimensi kewajiban pemerintah untuk (a) mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan secara terbuka (transparan); (b) menunjukkan apa yang dilakukan dalam bentuk laporan atau penjelasan, yang kesemuanya merupakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat. Kedua, berupa hak rakyat untuk, (a) memperoleh informasi berupa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, dan (b) merasa puas dengan segala kebijakan pemerintah, karena setiap tahapan proses penyelenggaraan pemerintahan selalu menginformasikan kepada publik dan sebaliknya, masyarakat juga berhak melakukan kontrol. untuk setiap proses. Dalam hal ini sama sekali tidak dapat dipisahkan antara apa yang dilakukan pemerintah dengan kepentingan atau hak-hak rakyat di dalamnya. Ketika pemerintah tidak melaporkan atau tidak menginformasikan kepada publik apa yang dilakukannya, atau tidak memuaskan masyarakat, atau tidak dapat mengakomodir kepentingan rakyat sehingga mengecewakan, maka secara otomatis berarti telah melanggar hak-hak rakyat.

Upaya untuk memperbaiki di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan oleh pemerintah daerah melalui internet, surat kabar, atau cara lain belum menjadikan hal yang umum bagi sebagian daerah terutama pada instansi kecamatan. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para penggunanya.

Obyek penelitian ini memilih pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri hulu. Dimana anggaran yang tersedia untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada setiap akhir tahun anggaran yang dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi. Dana yang dipakai di peroleh dari APBD yang berupa dana desa.

Selanjutnya, Anggaran Pertahun 2018 yaitu dengan anggaran 4,198,711,864.25 dan Realisasi 4,062,272,791.00. Anggaran Pertahun 2019 yaitu dengan Anggaran 6,664,732,644.15 dan Realisasi 6,073,068,499.00.

Selanjutnya, pengukuran capaian kinerja 2018 dan 2019 dibagian sasaran Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam uraian usulan pembangunan di musrenbang tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti dengan Target 148 usulan, Realisasi 37 usulan dan 25%. Sehingga tidak tercapainya target yang diusulan.

Selanjutnya, pengukuran capaian kinerja 2018 dibagian sasaran Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dalam uraian desa yang memenangi lomba/kejuaraan tingkat desa dengan Target 3 desa, Realisasi 1 desa dan 100%. Dan lembaga sosial ekonomi yang dibentuk dan aktif di desa dengan Target 8 desa, Realisasi 2 desa, dan 100% sehingga tidak tercapainya target yang dicapai.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “ Analisis Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas penulis membuat Perumusan Masalah dalam penelitian ini :

Bagaimana Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, menambah dan memperdalam pengetahuan tentang analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bagi Kantor Camat Rengat Barat, diharapkan memberikan masukan dan membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada setiap instansi.
3. Bagi fakultas, agar dapat dijadikan perbandingan atau acuan bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian sejenis bagi peneliti dimasa yang akan datang dan diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti lain dan bahan untuk menambah pengetahuan ilmu Akuntansi Sektor Publik,

khususnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besarnya penyusunan proposal ini, maka penulis membagikan dalam 5 bab yang diuraikan dalam sistematika penulis sebagai berikut ini :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Telaah pustaka dan hipotesis

Bab ini berisi telaah pustaka yang berdasarkan pada teori-teori pendukung yang saling berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori pendukung ini akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah. Tentunya teori-teori ini berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

BAB III : Metode penelitian

Bab ini membahas tentang lokasi, jenis penelitian, populasi, sampel, definisi operasional variable, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Gambaran umum penelitian

Bab ini membahas gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari obyek yang erat kaitannya dengan penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang dibuat oleh penulis mengenai penelitian ini dan juga memberikan saran menurut penyaji untuk kemajuan penelitian tersebut.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas dapat didefinisikan dalam banyak perspektif dan telah berubah dari waktu ke waktu. Banyak peneliti mendefinisikan akuntabilitas sesuai dengan konteks dan kondisi masing-masing. Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas menuntut pemerintah untuk memberikan alasan terkait sumber dan penggunaan sumber daya publik. Sehingga akuntabilitas berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan perilaku pemerintah, mencegah berkembangnya konsentrasi kekuasaan, dan meningkatkan kemampuan belajar dan efektifitas administrasi publik..

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ, sehingga organisasi pemerintah bisa berjalan efektif. Prinsip ini berhubungan dengan pengendalian terhadap hubungan organ yang ada dalam organisasi pemerintahan menyadari tanggung jawab, hak, wewenang dan kewajibannya. Akuntabilitas adalah suatu bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturannya perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efektif, efisien, dan ekonomis. Tujuan utamanya akuntabilitas ditekankan kepada setiap pengelola atau manajemen yang dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan.

Mardiasmo (2012:20) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawabn mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya akuntabilitas ini juga dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, (Mardiasmo:2014:20)

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:89) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Rakhmat (2009) mengemukakan bahwa Akuntabilitas adalah tugas individu atau unit organisasi untuk mengendalikan dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga publik. Selanjutnya, dijelaskan bahwa sumber kontrol internal bertolak pada kewenangan yang melekat pada hubungan formal secara hubungan sosial atau hirarki informal dengan agen publik. Sumber control eksternal suatu pemisahan yang serupa, dimana kewenangan mereka dapat dibedakan dalam kewenangan yang berasal dari serangkaian pelaksanaan atau peraturan kekuasaan secara informal oleh kepentingan yang berasal di luar agen publik. Derajat kontrol yang tinggi ini mencerminkan kemampuan kontroler untuk menentukan dimana agen publik dan anggotanya dapat melakukannya. Sebaliknya, jika derajat kontrol yang rendah memberikan deskresi pada bagian operasi agen publik.

2.1.2 Transparansi

Transparansi pengelolaan keuangan daerah ini pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintahan daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi harus dibangun di atas informasi yang bebas, informasi yang harus diakses oleh semua proses pemerintah, lembaga, dan pemangku kepentingan, dan arus informasi yang tersedia harus sesuai. (Corynata, 2015:99)

Krina (2012:133) mengemukakan bahwa transparansi adalah asas yang menjamin kebebasan atau akses setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan dan pembuatan serta hasil yang dicapai. Selanjutnys, Krina (2012:133) juga menjelaskan bahwa prinsip transparansi ini memiliki dua aspek, yaitu: (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak publik untuk mengakses informasi. Transparansi adalah adanya kebijakan yang terbuka untuk pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah segala sesuatu tentang segala aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Keterbukaan informasi diharapkan menghasilkan persaingan politik yang sehat, kebijakan dan toleransi dibuat berdasarkan preferensi publik.

Akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan perubahan anggaran, perhitungan anggaran dan anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai instrumen pengendalian pengelolaan daerah perlu diberikan kebebasan untuk mengakses informasi tentang akuntabilitas dan kinerja anggaran. Oleh karena itu, APBD harus mampu memberikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan lengkap untuk kepentingan pemerintah pusat, dan masyarakat dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian APBD. Sejalan dengan itu, pelaporan proyek, pelaksanaan dan perencanaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis dan teknis kepada masyarakat, legislatif dan pihak independen yang membutuhkan.

2.1.3 Akuntabilitas keuangan daerah

Akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang rakyat kepada pihak yang berhak dan berwenang menuntut pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus diperhatikan adalah: (1) aspek legalitas pendapatan dan belanja daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak ke otoritas hukum; (2) penatagunaan keuangan daerah yang baik, perlindungan aspek fisik dan keuangan, pencegahan pemborosan dan salah urus. Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan daerah meliputi: (1) adanya sistem anggaran dan sistem akuntansi yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) belanja daerah berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang ingin dicapai.

Akuntabilitas keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab, menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional kepada publik melalui Laporan Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun anggaran.

2.1.4 Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan umum (*sektor publik*) dengan baik. Mardiasmo (1999 : 124) juga mengemukakan “ elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi akuntabilitas, value for money, transparansi, kejujuran, dan pengendalian”.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didefinisikan sebagai praktik, mekanisme, dan prosedur pemerintah dan warga negara mengelola sumber daya dan memecahkan masalah publik. Dalam konsep pemerintahan, pemerintah hanya satu aktor dan tidak selalu aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai penyedia layanan dan pengembang dan infrastruktur akan bergeser menjadi pendorong terciptanya lingkungan mampu memfasilitasi pihak lain dalam masyarakat. Tuntutan pemerintah mendefinisikan kembali peran negara, dan itu berarti mendefinisikan kembali peran warga negara. Tuntutan yang lebih besar pada penduduk termasuk pemantauan pertanggungjawaban pemerintah.

Konsep good governance memiliki tiga pilar, yaitu negara (state atau government) yang berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta (private sector atau dunia usaha) yang berfungsi untuk menciptakan pendapatan dan lapangan pekerjaan, juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan ekonomi, sosial, dan politik yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri dan masyarakat yang berperan positif dalam interaksi ekonomi, sosial, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok di masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik. Good governance merupakan hubungan yang konstruktif dan sinergis antara swasta, masyarakat dan negara serta memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi suatu negara dalam melaksanakannya. Menurut UNDP dalam Safrijal dkk (2016: 180-182), prinsip-prinsip good governance terdiri dari:

1. Partisipasi (*Participation*), sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga memiliki kewajiban dan hak untuk berperan serta dalam proses bernegara, pemerintahan, dan masyarakat. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui lembaga perantara atau secara langsung.
2. Penegakan hukum (*Rule of law*), proses yang mewujudkan good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakan rule of law dengan karakter antara lain yaitu supremasi hukum the supremacy of law. hukum yang reponsip, penegakkan hukum, kepastian hukum (*legal certainty*), yang konsisten dan non-diskriminatif dan independen peradilan.

3. *Transparansi (Transparency)*, keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. *Daya Tanggap (Responsiveness)*, sebagai konsekuensi keterbukaan dari logis, setiap komponen yang terlibat dalam proses penyelenggaraan good governance ini harus memiliki daya tanggap terhadap apa keinginan atau keluhan stakeholders.
5. *Berorientasi pada konsensus (Consensus orientation)*, Dalam tata pemerintahan yang baik, pengambilan keputusan bersama atau pemecahan masalah diprioritaskan berdasarkan konsensus yang diikuti dengan kemauan untuk secara konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama. Musyawarah bagi bangsa Indonesia ini sebenarnya bukan hal baru, karena nilai dasar dalam menyelesaikan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah untuk mufakat.
6. *Keadilan (Equity)*, setiap warga memiliki kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan, tetapi karena kemampuan setiap warga yang berbeda, sektor publik harus berperan agar keadilan dan kesejahteraan dapat berjalan.
7. *Efisiensi dan Efektifitas (Efficiency and Effectiveness)*, Agar suatu negara mampu bersaing secara sehat dalam urusan dunia, maka kegiatan tiga pilar good governance harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatannya. Penekanan pada perlunya efisiensi dan efektifitas terutama ditunjukkan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan kegiatannya secara monopolistik dan non-kompetitif.
8. *Akuntabilitas (Accountability)*, Setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga tidak hanya kepada atasan, tetapi juga kepada stakeholders yaitu masyarakat luas.

2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dapat mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang andal dan lengkap kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat SAP, adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah (Pemerintah, 2014). Menurut KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan), Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyajikan dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD (KSAP,2015). Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah pedoman wajib dalam menyajikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka tercapainya akuntabilitas dan transparansi.

Komite SAP terdiri atas komite kerja dan komite konsultatif. Berbeda komite kerja yang bertugas menyusun, menyiapkan, dan merumuskan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP, dan dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk kelompok kerja dengan Komite konsultatif bertugas memberikan pendapat atau saran dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP.

Dengan demikian, Komite SAP ini memiliki tujuan dalam mengembangkan program manajemen dan akuntabilitas keuangan pemerintahan, termasuk mempromosikan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah salah satu produk pengembangan dari Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual yang dikembangkan oleh KSAP.

2.1.6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisikan gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis (LAN:2003). LAKIP harus menyajikan informasi dan data relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun, menyajikan dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, melembaga dan periodik. Laporan kinerja ini dimaksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses instansi pemerintah dan tujuan pencapaian sasaran. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kegagalan dan keberhasilan tingkat kerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP ini dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan setahun sekali.

2.1.7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengidentifikasi, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dilandasi oleh kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan

Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), penyusunan laporan keuangan, pemeriksa dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diaturs dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, peralatan, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan ini diharapkan diikuti dengan aturan pelaksanaannya yang baik berupa Peraturan Menteri keuangan dalam negeri untuk pemerintah daerah.

Komponen laporan keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

2.1.8 Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasno (2009:04) Pengukuran Kinerja merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pengukuran Kinerja dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Menurut Abdul dan Iqbal, Pengukuran Kinerja adalah anggaran berbasis kinerja yang menuntut adanya output yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran ini harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja ini adalah pengukuran anggaran berbasis kinerja yang bersifat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Kriteria pokok yang mendasari

pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas public (Mardiasmo, 2018).

1. Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2009:133), pengukuran ekonomis hanya akan mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomis merupakan ukuran relative. Dengan demikian ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100$$

Kriteria ekonomis yang dimaksud sebagai berikut:

- 1). Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis
- 2). Jika diperoleh nilai sama dengan dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomis berimbang.
- 3). Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis.

2. Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009: 132), indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Masukkan indikator memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisien dari proses internal).

Menurut Mardiasmo (2009: 133), efisiensi ini diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi yang dimaksud sebagai berikut:

- 1). Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% ($X < 100\%$), maka artinya efisien.
- 2). Jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$), maka artinya efisiensi cukup seimbang.
- 3) Jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$), maka artinya efisien.

3. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2019: 86), Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100$$

Kriteria efektivitas yang dimaksud sebagai berikut :

- 1). Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% ($X < 100\%$), maka artinya sangat efektif.
- 2). Jika perbandingan nilai yang diperoleh sama 100% ($X = 100\%$), maka artinya efektivitas cukup berimbang.
- 3). Jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$), maka artinya sangat efektif.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Zulfan Nahrudin (2014)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru	Pendekatan Kuantitatif	Secara keseluruhan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi desa di desa Pao-pao, kecamatan Tanete Rilau berjalan dengan baik dari semua dimensi yang dijelaskan, termasuk dimensi transparansi yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana alokasi desa berjalan secara transparan. Hal ini terjadi karena informasi mudah diakses dari desa dan komunikasi yang baik. oleh aparat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dinilai transparan hanya dari dimensi pengendalian yang perlu dioptimalkan sedangkan dari dimensi kehandalan, tanggung jawab dan daya tanggap berjalan dengan baik.
2.	Risya Umami (2017)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Wilayah	Metode Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa trnsparansi dan akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa di Wilayah Kecamatan Surade.

		Kecamatan Surade).		
3.	Ni Ketut Juni Kalmi Dewi, Anant awikarma Tungga Adtmaja, Nyoman Trisna herawai (2015)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan di tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang)	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber pemasukan reguler dadia berasal dari peturunan (iuran wajib), pengampel (iuran wajib bagi warga dadia di luar Bali) dan pendapatan bunga pinjaman. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara mengumumkan pemasukan pengeluaran, serta menempel laporan keuangan sederhana di papan pengumuman.
4.	Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan (2016)	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mangondow)	Metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDesa.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang diuraikan diatas, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu belum akuntabel dan Transparan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang terletak di Desa Pematang Reba

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan dalam penyelesaian penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang penulis ambil secara langsung dan diolah sendiri, dari wawancara lisan kepada pihak bagian keuangan yang ada di Kantor Camat Rengat Barat.
2. Data Sekunder, data yang di olah dan disiapkan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti Laporan Keuangan Tahun 2018 dan 2019 Kantor Camat Rengat Barat serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan saat mengambil data peneliti disesuaikan dengan metode. Hal ini dilakukan karena dalam pengumpulan data metode dan teknik saling berhubungan.

Maka teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada pihak bagian keuangan pada Kantor Camat Rengat Barat yang mempunyai wewenang dalam memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumen yang dikumpulkan yaitu memfotocopy dokumen atau laporan keuangan yang diterima dari bagian keuangan Kantor Camat Rengat Barat berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, daftar aset dan lain sebagainya.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data yang digunakan untuk menelaah masalah yang ditemui dalam kantor camat yang diteliti, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh penulis dalam penelitiannya sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya mengkoreksi kembali teori-teori yang mendukung serta dapat memecahkan permasalahan dan sebagai penutup diambil kesimpulan dan saran-saran kepada kantor camat tersebut.

3.5 Indikator Akuntabilitas dan Transparansi

Operasional di perlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variable yang terkait dalam penelitian ini.

1. Indikator Akuntabilitas

Adisasmita (2011:18) menjelaskan Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan pengungkapan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam pertanggungjawaban ini yaitu berupa laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penyimpangan, penerimaan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Mardiasmo (2010) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, mengungkapkan dan menyajikan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk

memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu 2) hak untuk diberi informasi dan 3) hak untuk didengar aspirasinya Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permen No.25 Tahun 2012, pengukuran akuntabilitas digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Adapun dimensi Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan indikator menurut Hopwood dan Tomkins, Elwood, dalam Mahmudi (2013:9):

A. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*) memiliki indikator :

1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi
2. Menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap peraturan lain dan hukum lain yang mengisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran terkait dengan adanya penghindaran penyalahgunaan jabatan .

B. Akuntabilitas Proses memiliki indikator :

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

C. Akuntabilitas Program memiliki indikator :

1. Pencapaian visi, Misi dan Tujuan organisasi

D. Akuntabilitas Kebijakan memiliki indikator :

1. pertanggungjawabn atas kebijakan yang diambil

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat dan daerah, atas kebijakan yang akan diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

E. Akuntabilitas Finansial memiliki indikator :

1. Efektif dan efisien dan ekonomis

Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik (publik money) secara efisiensi, efektif ,dan ekonomi. tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2. Indikator Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintah (2010).

transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini menyangkut kemampuan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di setiap SKPD yang ada di kantor Camat Rengat Barat untuk mempublikasi dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang di buatnya kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Adapun karakteristik transparansi dan indikator menurut Mardiasmo (2009:19):

A. Informatif (*Informative*) memiliki indikator :

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

B. Keterbukaan (*Openness*) memiliki indikator :

Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh undang-undang.

C. Pengungkapan (*Disclosure*) memiliki indikator :

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik {stakeholders} atas aktivitas dan kinerja finansial.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Singkat Kecamatan Rengat Barat

Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu adalah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Kantor Camat Rengat Barat merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah No 33 tahun 1995 pada tanggal 4 september 1995 dan diresmikan pada tanggal 13 januari 1996. Sebelum wilayah ini merupakan perwakilan Kanto Camat Rengat yang membawahi 17 desa dan 1 kelurahan disebelah barat Kecamatan Rengat.

Secara umum keadaan topografinya berupa daratan meskipun ada beberapa daerah yang berbukit dan ada juga yang berupa rawa. Sementara ketinggian dari permukaan air laut untuk daerah Rengat Barat adlah sekitar 27 meter.

Seluruh desa diwilayah Rengat Barat ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan jarak desa terjauh +16 km dari pusat kecamatan yaitu desa alang kepayang dan desa alang berangan.

Kecamatan Rengat Barat ini beribukotakan Pematang Reba, dengan memiliki ciri khas sebuah tugu yang berbentuk dua ekor ikan patin yang berada di bawah sekuntum Bunga Seroja, tugu kebanggan Kecamatan Rengat Barat ini berada di Kelurahan Pematang Reba sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Rengat Barat dan Kabupaten Indragiri Hulu.

4.1.2 Aspek Geografi

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Rengat Barat adalah berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dataran sementara ketinggian dari permukaan laut di daerah Rengat Barat adalah sekitar 27 meter permukaan meter. Desa Tanah Datar merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang

mencapai 52 meter. Sebaliknya beberapa desa yakni Barangan, Alang Kepayang, Danau Baru dan Readang merupakan desa terendah dengan wilayah yang paling dekat dengan permukaan laut, dengan ketinggian rendah yakni 13 meter dari permukaan laut tersebut.

Seluruh desa di wilayah Kecamatan Rengat Barat dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan empat dengan jarak desa terjauh +16 km dari pusat pemerintah Kabupaten yaitu desa Alang Kepayang.

Luas wilayah Kecamatan Rengat Barat lebih kurang 185,31 kilometer persegi terletak pada posisi 102 derajat 0 detik sampai 102 derajat 30 detik bujur timur, dan 0 derajat 10 detik sampai 0 derajat 32 detik lintang selatan dengan batas-batas Kecamatan Rengat Barat :

- Utara : Kabupaten Pelalawan
- Selatan : Kecamatan Seberida
- Timur : Kecamatan Rengat
- Barat : Kecamatan Lirik dan Kecamatan Pasir Penyu

Diwilayah Kecamatan Rengat Barat ini masih terdapat suku asli pendalaman yaitu suku “Talang Mamak” yang sebagian wilayah Desa Talang Jerinjing, yang sebagian besar dari mereka masih menganut agama islam.

Dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang mengalihkan kantor/instansi/badan tingkat Kabupaten dari Rengat ke Pematang Reba sebagai alternatif pengembangan kota Rengat, merupakan suatu hal positif yang akan memicu dan memacu pertumbuhan Pematang Reba sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten.

Tabel 4.1 Topografi dan Ketinggian dari Permukaan Laut menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengat Barat.

No	Desa/ Kelurahan	Topografi	Ketinggian dari Permukaan laut (\pm m)
1.	Barangan	Daerah Aliran Sungai	13
2.	Alang Kepayang	Daerah Aliran Sungai	13
3.	Danau Baru	Daerah Aliran Sungai	13
4.	Redang	Daerah Aliran Sungai	13
5.	Kota lama	Dataran	19
6.	Sungai Dawu	Dataran	35
7.	Pematang Jaya	Dataran	35
8.	Bukit Petaling	Dataran	35
9.	Tanah Datar	Dataran	52
10.	Talang Jerinjing	Dataran	35
11.	Pematang Reba	Dataran	23
12.	Pekan Heran	Dataran	13
13.	Rantau Bakung	Daerah Aliran Sungai	13
14.	Sialang Dua Dahan	Daerah Aliran Sungai	13
15.	Tani Makmur	Dataran	48
16.	Sungai Baung	Dataran	48
17.	Air Jernih	Dataran	43
18.	Danau Tiga	Dataran	19

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan

Kecamatan Rengat Barat dilewati oleh jalur lintas timur, dengan dominasi utama wilayah adalah perkebunan. Berdasarkan statistik daerah Rengat Barat 2019 luas penggunaan lahan di Kecamatan Rengat Barat terbagi atas 7.610 Ha areal perkebunan, 1.489 Ha Wilayah perumahan dan 106 Ha dipergunakan untuk fasilitas umum. Dari segi Pemerintahan Kecamatan Rengat Barat terdiri dari 61 dusun, 272 RT dan 110 RW.

4.1.3 Visi dan Misi Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

a. Adapun Visi Kantor Camat Rengat Barat 2015-2020 adalah :

“Menjadikan Kantor Camat Rengat Barat instansi terdepan dalam pelayanan prima kepada masyarakat guna mendukung visi Kabupaten Indragiri Hulu”.

b. Misi Kantor Camat Rengat Barat adalah :

1. Menyediakan aparatur yang handal, ramah dan berkompeten dalam melaksanakan tugasnya
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kenyamanan aparatur dalam melaksanakan tugas
3. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Percepatan proses pelayanan.

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten atau Kota sebagai dipimpin oleh Camat. Sedangkan Camat berkendudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam konteks ini ekonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dan Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Organisasi Kecamatan dipimpin oleh satu Camat, satu Sekretaris, dan paling banyak lima Seksi yang masing-masing dipimpin oleh satu Kepala Seksi, dan Sekretariat paling banyak tiga Sub Bagian yang masing-masing dikepalai oleh satu Kepala Sub Bagian. Camat menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Penetapan

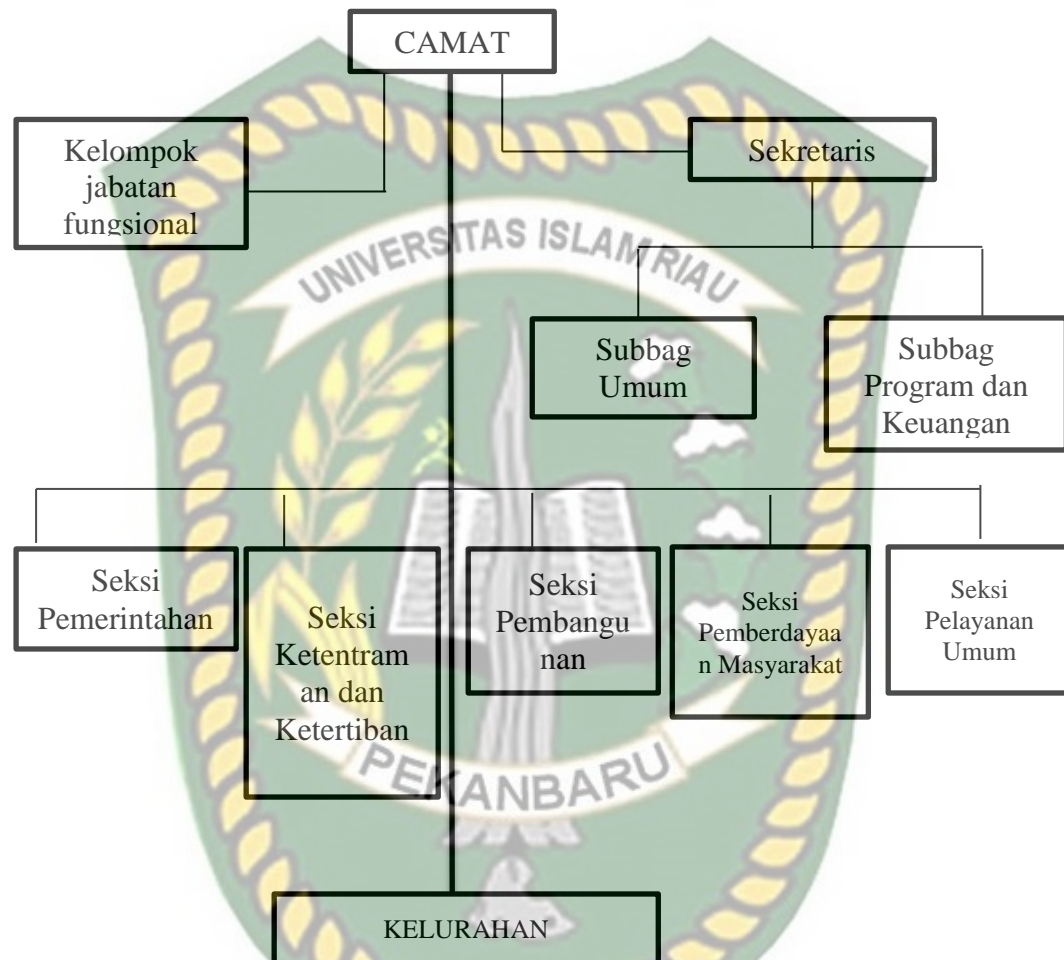
- g. Fasilitas
- h. Penetapan
- i. Penyelenggaraan, dan
- j. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

4.1.5 Struktur Organisasi

gambaran tentang bagian susunan organisasi Kecamatan Rengat Barat adalah sebagai berikut:



GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub bagian umum
 - 2) Sub bagian program dan keuangan
- c. Bagian pemerintahan
- d. Seksi ketentraman dan ketertiban
- e. Seksi pemberdayaan masyarakat

f. Seksi pelayanan umum

g. Seksi pembangunan

Adapun Sumber Daya manusia yang dimiliki Kantor Camat Rengat Barat pada Kantor Camat Rengat Barat adalah sebanyak 44 personil, sebagai berikut:

a. Pegawai

Gol IV : 1 Orang

Gol III : 21 Orang

Gol II : 20 Orang

b. Eselon

Eselon III/a : 1 Orang

Eselon III/b : 0 Orang

Eselon IV/a : 6 Orang

Eselon IV/b : 6 Orang

c. Jabatan fungsional, ada 3 terdiri dari :

- 1 orang Koordinator Statistik Kecamatan
- 1 orang Koordinator PKB (penyuluh keluarga berencana) dan
- 1 orang Komandan Regu Satpol PP Kecamatan

d. Tenaga honorer sebanyak 22 orang untuk membantu kegiatan rutin pada Sekretariat yang tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh PNS yang ada, antara lain :

- Tenaga Operator Komputer 1 orang
- Tenaga Operator e-KTP 2 orang
- Tenaga Operator khusus 1 orang
- Tenaga Sopir 1 orang
- Tenaga Kebersihan 2 orang
- Tenaga Keamanan (penjaga kantor) 2 orang
- Tenaga Harian Lepas 13 orang

e. Tenaga Kontrak sebanyak 11 orang, antara lain :

- Tenaga Penyuluh Lapangan KB 6 orang
- Tenaga Satpol PP 5 orang

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Akuntabilitas

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dapat dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang nilai-nilai dan norma norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Rangkaian kegiatan proses pengelolaan keuangan desa diawali dengan proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah sebuah proses yang akan menentukan tindakan dimasa depan yang tepat melalui urutan prioritas dan pilihan dengan perhitungan sumber daya yang tersedia.

Proses perencanaan dan penganggaran ini sangat penting untuk keseluruhan rangkaian pembangunan yang akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah sebuah dokumen publik yang sudah seharusnya disusun secara partisipatif. Rakyat yang hakikatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara berapa dan darimana besar pendapatan dan diajak dalam bermusyawarah untuk kewenangan desa dibelanjakan. Dengan demikian harapan mengenai anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud dan berjalan.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil temuan-temuan dalam menganalisis indikator teori yang telah difokuskan pada akuntabilitas kebijakan, proses akuntabilitas, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, adapun temuan-temuan akuntabilitas pada kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

A. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

1) Penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi

Kantor Camat Rengat Barat Melalui wawancara dengan Ibu indah mengenai penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi tidak pernah terjadi pada

Kantor Camat Rengat Barat bisa dilihat dimana tidak ada media yang membahas penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi tersebut. Sehingga sudah baik.

2) Menaati Aturan Hukum yang berlaku

Kantor Camat Rengat Barat sudah bekerja sesuai laporan keuangan disusun berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Sehingga sudah akuntabel.

B. Akuntabilitas Proses

Secara proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Rengat Barat secara administrasi kurang baik, melalui wawancara dengan bapak henki mengatakan karena telat dalam melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, penyebab dari keterlambatan adalah kurangnya personil yang profesional dalam Pengelolaan Keuangan, sehingga pelaksanaan SPJ dan pelaporan sedikit mengalami keterlambatan.

C. Akuntabilitas Program

1) Pencapaian Visi Misi dan Tujuan Organisasi

Perencanaan Pencapaian Visi Misi dan Tujuan Organisasi hingga tahap pelaksanaan telah dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Rengat Barat, program perencanaan pembangunan daerah yang menjadi temuan-temuan penulis dilapangan ialah kecamatan Rengat Barat sejauh ini melakukan musrenbang dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat sangat minim, alasan dari salah satu tokoh pemuda yaitu bapak martono yang mengatakan kurangnya masyarakat dilibatkan dalam permasalahan kecamatan. Pemerintah Kecamatan Rengat Barat pun masih kurang dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga belum menunjukkan adanya kepuasan pada masyarakat.

D. Akuntabilitas Kebijakan

1) Pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil

Dalam pemilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kecamatan Rengat Barat, Desa Pematang Reba dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2018-2019 yang untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat Desa telah berjalan skala dengan skala prioritas pengguna desa.

E. Akuntabilitas Finansial

1) Tingkat ekonomis

Tingkat ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya dengan biaya serendah-rendahnya. Hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran sumber daya secara hati-hati. Menurut (Mardiasmo, 2009) kriteria ekonomis yaitu (1) Apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% maka artinya ekonomis, (2) jika perbandingan nilai yang diperoleh 100% maka artinya ekonomis berimbang atau cukup ekonomis, dan (3) jika perbandingan nilai yang diperoleh lebih dari 100% maka artinya tidak ekonomis.

Dilihat dari lampiran 1, pada tahun 2018 terdapat 24 kegiatan terealisasi dari 9 program pada Kantor Camat Rengat Barat. Dari 24 kegiatan tersebut sebanyak 18 kegiatan memiliki hasil perhitungan ekonomis dibawah 100%. Berdasarkan pada kriteria ekonomis, maka 18 kegiatan ini dinyatakan ekonomis. Ini menunjukkan bahwa Kantor Camat Rengat Barat telah melakukan penghematan pengeluaran dari anggaran yang telah ditetapkan pada 18 kegiatan tersebut. Selain itu, terdapat 26 kegiatan lainnya memiliki nilai perhitungan ekonomis sebesar 100%. Berdasarkan pada kriteria ekonomis, maka 26 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada 26 kegiatan ini sama dengan jumlah anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Namun ada 5 kegiatan yang memiliki nilai 0% karena tidak adanya realisasi pada kegiatan tersebut.

Dilihat dari lampiran 2, pada tahun 2019 terdapat 33 kegiatan yang terealisasi dari 17 Program pada Kantor Camat Rengat Barat. Dari 33 kegiatan tersebut sebanyak 18 kegiatan memiliki hasil perhitungan ekonomis dibawah 100%. Berdasarkan pada kriteria ekonomis, maka 18 kegiatan ini dinyatakan ekonomis. Ini menunjukkan bahwa Kantor Camat Rengat Barat telah melakukan penghematan pengeluaran dari anggaran yang telah ditetapkan pada 18 kegiatan tersebut. Selain itu, terdapat 15 kegiatan lainnya memiliki nilai perhitungan ekonomis sebesar 100%. Berdasarkan pada kriteria ekonomis, maka 15 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada 15 kegiatan ini sama dengan jumlah anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Namun ada 1 kegiatan yaitu Pelayanan Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pematang Reba (DAU Tambahan) yang memiliki nilai 0% karena tidak adanya realisasi pada kegiatan tersebut.

2) Tingkat Efisiensi

Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila hasil kinerja yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Efisiensi dapat dihitung dengan membagi hasil yang dicapai dengan realisasi anggaran dikalikan 100%. Menurut (Mardiasmo, 2009) kriteria ekonomis yaitu (1) apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100% maka artinya tidak efisien, (2) jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% maka artinya efisien.

Dilihat dari Lampiran 3, pada tahun 2018 terdapat 17 kegiatan memiliki hasil perhitungan efisiensi diatas 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 17% kegiatan ini dinyatakan efisien. Hal ini berarti bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 17 kegiatan tersebut melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 27 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi sama dengan 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 27 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 27 kegiatan tersebut sama dengan persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Selain itu, terdapat 5 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan

efisiensi dibawah 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi maka 5 kegiatan ini untuk persentase fisiknya kurang dari persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dilihat dari Lampiran 4, pada tahun 2019, terdapat 14 kegiatan memiliki hasil perhitungan efisiensi diatas 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 14 kegiatan ini dinyatakan efisien. Hal ini berarti bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 15 kegiatan tersebut melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 19 kegiatan yang memiliki nilai efisiensi sama 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 19 kegiatan dinyatakan efisiensi berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 19 kegiatan tersebut sama dengan persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

3) Tingkat Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan program-program kegiatan yang dijalankan sudah tercapai sesuai sasaran dan tujuan. Menurut (Mardiasmo, 2009) kriteria efektivitas yaitu (1) apabila perbandingan nilai yang diperoleh angkanya kurang dari 100%, maka artinya tidak efektif, (2) jika perbandingan nilai yang diperoleh sama dengan 100% maka artinya efektivitas sangat efektif.

Dilihat dari Lampiran 5, pada tahun 2018 terdapat 32 kegiatan memiliki hasil perhitungan efektivitas sebesar 100%. Berdasarkan pada kriteria efektivitas, maka 32 kegiatan dinyatakan efektivitas berimbang. Hal ini berarti realisasi hasil pada 32 kegiatan ini sama dengan ekspektasi hasil fisik yang diinginkan objek. Kemudian terdapat 8 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi dibawah 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka kegiatan 8 ini dinyatakan tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 8 kegiatan tersebut tidak mencapai ekspektasi hasil realisasi yang diinginkan objek.

Dilihat dari Lampiran 6, pada tahun 2019, terdapat 20 kegiatan memiliki hasil perhitungan efektivitas diatas 100%. Berdasarkan pada kriteria efektivitas maka 20 kegiatan ini dinyatakan efektif. Hal ini berarti realisasi hasil pada 20 kegiatan tersebut melebihi ekspektasi nilai perhitungan efisiensi sama dengan 100%.

Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 13 kegiatan ini dinyatakan efektif berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 13 kegiatan tersebut sama dengan ekspektasi yang diinginkan objek.

Terdapat 1 kegiatan yang telah memenuhi 3 elemen utama yaitu kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah pada program peningkatan pelayanan administrasi kantor di tahun 2019. Program ini telah mencapai kinerja pelayanan sesuai. dimana dengan diperolehnya sasaran persentase. Sedangkan untuk tahun 2018 tidak ditemukan kegiatan yang telah memenuhi 3 elemen karena pada tahun 2018 belum ada kegiatan yang mencapai nilai efektivitas diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kantor Camat Rengat Barat masih belum berjalan dengan baik. Meskipun hampir semua kegiatan telah ekonomis dan efisiensi pada tahun 2018 dan 2019 tetapi banyak kegiatan yang dinilai belum efektif. Banyak dari kegiatan yang memiliki nilai efektivitas sama dengan 100% yang berarti program program kegiatan yang dijalankan tidak melebihi target yang ditetapkan oleh Kantor Camat Rengat Barat.

4.2.2 Transparansi

Berdasarkan hasil analisis Transparansi pengelolaan keuangan dalam perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2019 dapat disimpulkan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari :

A. Indikator Informatif

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Rengat Barat pada tahun 2018-2019 selalu melibatkan masyarakat baik keterlibatan bentuk fisik maupun finansial. Namun setiap pelaksanaan kegiatan dimasing-masing perencanaan pembangunan daerah, tidak diinformasikan melalui papan informasi yang disediakan. Sehingga rincian anggaran APBD masyarakat kurang mengetahui pengelolaan keuangan dari dana transfer pemerintah terkait pembangunannya untuk dana desa.

B. Indikator Keterbukaan

yang melibatkan masyarakat dalam transparansi pengelolaan keuangan untuk perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu diantaranya adalah dalam penyampaian bentuk sistem informasi website yang masih kurang baik. Hal ini disebabkan karena terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang kurang memadai untuk menjalankan tugas ini dan harus adanya pendampingan terhadap pengelolaan website agar dapat menyampaikan bentuk laporan keuangan bukan hanya dalam program perencanaan pembangunan daerah saja, namun dalam keseluruhan program kerja kegiatan Pemerintah Kecamatan Rengat Barat, sehingga belum tercapainya pemerintahan yang transparansi dan akuntabel.

C. Indikator Pengungkapan

Dalam Kantor Camat Rengat Barat Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan atau suara rakyat dengan dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Walaupun tidak semua usulan atau suara rakyat berpengaruh terhadap anggaran transparansi. Sehingga Transparansi pengungkapan sudah cukup baik.

4.2.3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu memiliki program dan kegiatan setiap tahunnya. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan juga dijabarkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan program dan kegiatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Rengat Barat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Kecamatan Rengat Barat tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat	Usulan pembangunan di Musrenbang tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti.	148 usulan	37 usulan	25%
	Partisipasi desa pada event-event tingkat kecamatan	100%	100%	100%
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Presentase kejadian konflik horizontal bernuansa SARA	1 Kejadian	1 Kejadian	100%
Terwujudnya kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Jumlah rekomendasi izin HO yang dikeluarkan	0	0	0%
	Jumlah rekomendasi IMB yang dikeluarkan	37 Berkas	37 Berkas	100%
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dikantor camat	1	1	100%
	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di wilayah kecamatan	0	0	0%
Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Penyampaian laporan tepat waktu	100%	100%	100%
Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa	Ketepatan waktu penyampaian SPJ ADD	17 desa, 1 kelurahan	17 desa, 1 kelurahan	100%
	Desa yang memenangi lomba/kejujuran tingkat desa	3 desa	1 desa	100%
	Lembaga sosial	8 desa	2 desa	100%

	ekonomi yang dibentuk dan aktif di desa			
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengurus e-KTP dari jumlah W	1.355 buah	1.355 buah	100%

Sumber data Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2018

Berdasarkan tabel 4.3 terdapat di Sasaran Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam uraian Usulan pembangunan di Musrenbang tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti. Dengan target 148 Usulan dan realisasi 37 Usulan 25% sehingga tidak tercapainya Target.

Sasaran Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dalam uraian Desa yang memenangi lomba/kejujuran tingkat desa dengan target 3 Desa Usulan 1 Desa sehingga tidak tercapainya Target.

Sasaran Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dalam uraian Lembaga sosial ekonomi yang dibentuk dan aktif di desa dengan target 8 Desa Usulan 2 Desa sehingga tidak tercapainya Target.

Melalui wawancara dengan bapak henki mengenai mengapa tidak mencapai target yang diusulkan yaitu karena adanya rasionalisasi, rasionalisasi terjadi karena yang dianggarkan sama realisasi transfer dari pusat itu tidak tercapai sehingga terjadinya rasionalisasi dan tidak jadi APBD perubahan makanya kinerja itu dibawah target.

Tabel 4.4 Capaian Kinerja Kecamatan Rengat Barat Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat	Usulan pembangunan di Musrenbang tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti.	148 usulan	37 usulan	25%
	Partisipasi desa pada event-event tingkat kecamatan	100%	100%	100%

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Presentase kejadian konflik horizontal bernuansa SARA	0	0	100%
Terwujudnya kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Jumlah rekomendasi izin HO yang dikeluarkan	0	0	0%
	Jumlah rekomendasi IMB yang dikeluarkan	30 Berkas	30 Berkas	100%
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dikantor camat	1	1	100%
	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di wilayah kecamatan	3	3	100%
Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Penyampaian laporan tepat waktu	100%	100%	100%
Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa	Ketepatan waktu penyampaian SPJ ADD	17 desa, 1 kelurahan	17 desa, 1 kelurahan	100%
	Desa yang memenangi lomba/kejujuran tingkat desa	0	0	100%
	Lembaga sosial ekonomi yang dibentuk dan aktif di desa	0	0	100%
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengurus e-KTP dari jumlah W	1.670 buah	1.670 buah	100%

Sumber data Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.4 terdapat di Sasaran Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam uraian Usulan pembangunan di Musrenbang tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti Dengan target 148 Usulan dan realisasi 37 Usulan sehingga Target yang di capai 25% .

Melalui wawancara dengan bapak Henki mengenai mengapa tidak mencapai target yang diusulkan yaitu karena adanya rasionalisasi, rasionalisasi terjadi karena yang dianggarkan sama realisasi transfer dari pusat itu tidak tercapai sehingga terjadinya rasionalisasi dan tidak jadi APBD perubahan makanya kinerja itu dibawah target.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian beberapa indikator akuntabilitas kurang baik seperti Akuntabilitas Proses, akuntabilitas Program dan akuntabilitas finansial, sehingga belum akuntabel.
2. Berdasarkan hasil penelitian indikator informatif pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Rengat Barat pada tahun 2018-2019 selalu melibatkan masyarakat, Namun setiap pelaksanaan kegiatan dimasing-masing perencanaan pembangunan daerah, tidak diinformasikan melalui papan informasi atau baliho yang disediakan.
3. Berdasarkan hasil penelitian indikator keterbukaan penyampaian bentuk sistem informasi website masih kurang baik dalam transparansi pengelolaan keuangan di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Berdasarkan hasil penelitian indikator pengungkapan sudah cukup baik dengan mendengarkan usulan rakyat atau masyarakat yang berpartisipasi.
5. Pada tahun 2018 tidak terdapat kegiatan yang bersifat efektif. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 18 kegiatan dari 33 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu bersifat efektif. Hal ini berarti pada tahun 2018-2019, 65% kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Rengat Barat bersifat ekonomis. Selain itu, pada tahun 2018 dan 2019 hanya 1 kegiatan yang telah memenuhi 3 elemen. Hal ini menunjukkan belum memenuhi elemen.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai pelengkap hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh pemerintah.
2. Bagi Kantor Camat Rengat Barat, untuk mencerminkan prinsip akuntabel dan transparansi yang lebih baik lagi, sebaiknya pemerintah juga memasang baliho mengenai anggaran perencanaan pembangunan daerah oleh kantor Camat tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui jumlah anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Dan dapat mengevaluasi program kegiatan yang dijalankan agar dapat memperbaiki kinerja. Hal ini sangat bermanfaat agar mengambil keputusan untuk seluruh program-program dapat berjalan dengan baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji secara luas mengenai Analisis Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Laporan Keuangan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, Dian (2013). Pengaruh Penyajian Laporan keuangan, Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. *Vol. 3, No. 3, hlm: 351-362, 3, 351-362.*
- Tamalah Dafit. (2016). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- Zulkifli Umar, Cut Fittika Syahwalina. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Kolegial – Vol.6, No.2. Desember 2018, 6.*
- Fauzi, Nurmalia. Hasanah. (2017). Akuntansi Pemerintah. *Penerbit In Media, 2017, 26-196.*
- Nahrudin, Zulfan. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Vol. IV No. 2 Oktober 2014, 4, 193-201.*
- Zulsrianti, Elmi. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Nagari Pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 16-25.*
- Denny Boy, Hotniar. Siringoringo. (2009). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 12 Vol. 14, Agustus 2009, 14.*
- Rahmawati, Dita (2017). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Di Kabupaten Karanganyar. *Universitas Muhammadiyah Surakarta .*
- Ait Novatiani R., Wedi. Rusnawan. Kusuma (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis - Vol 10 No 1 Maret 2019, 10, 51-59.*
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmi Fajri, Endah. Setyowati. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan,

Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (Jap) Vol. 3, No. 7, Hal. 1099-1104.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Liswiyani, Dwi. Fitri. (2018). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang. *STIE Perbanas Surabaya*, 10-22.

Margaretha. Hendriani. (2011). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantulg. *SI Thesis, Uajy.*, 18-45.

badruzzaman, Sopyan. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey Pada Dinas Di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). 68-72.

Muhammad Luthfi Iznillah, (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1, Oktober 2018 : 29 - 41*, 7, 30-41.

Nurodin, Risya. Umami. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas. *Vol. 6 Edisi 11, Okt 2017, 6*, 74-80.

Ni Ketut Juni Kalmi Dewi, Anantawikrama. Tunga. (2015). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Tingkat Dadia (Studi Kasus Pada Dadia Punduh Sedahan Di Desa Pakraman Bila Bajang). *Akuntansi Program SI (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)*, 3, 1-11.

Adianto Adi Sangki, Ronny. Gosal. (2016). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). 1-12.